



**PEMERINTAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR**

LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

**DINAS PERIKANAN
KABUPATEN KUTAI TIMUR**



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR DINAS PERIKANAN

Jl. Sebel No. 1 Kawasan Pusat Perkantoran Bukit Palang email disperikautimor@gmail.com
SANGATTA 78611

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Timur yang terdiri dari :
Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas
dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir
adalah tanggung jawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern
yang memadai yang isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi
keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan standar
akuntansi pemerintahan.

Sangatta, 29 Januari 2026

Pengguna Anggaran



H. Yuliansyah, S.T.M.T

NIP. 19690704 200003 1 007

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan Keuangan Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Timur disusun untuk menyediakan informasi mengenai Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Timur selaku entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan : a) Akuntabilitas Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. b) Manajemen Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana. c) Transparansi Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Timur dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundangan.

Salah satu maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Timur adalah dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta menjunjung prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik. Adapun Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun manajemen entitas laporan. Oleh karena itu, laporan keuangan harus membuat catatan atas laporan keuangan sehingga memudahkan dalam memahami isi dari laporan keuangan.

Catatan atas laporan keuangan harus disajikan secara sistematis, setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan

Perubahan Ekuitas harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Dasar hukum penyusunan Laporan Keuangan Badan/Dinas Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2025 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
19. Peraturan Daerah Kutai Timur Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
20. Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 52 Tahun 2020 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 96 Tahun 2022;
21. Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Timur Nomor 92 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
22. Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 33 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk memudahkan pemahaman, maka catatan atas laporan keuangan disusun secara sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

- 1.1 Maksud Dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- 1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD

BAB II Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan SKPD

- 2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD
- 2.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

BAB III Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan SKPD

- 3.1. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran
- 3.2 Penjelasan atas Pos-Pos Neraca
- 3.3 Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional
- 3.4 Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

BAB IV Penjelasan atas Informasi Non Keuangan SKPD

BAB V Penutup

BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

Adapun Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan pada Dinas Perikanan periode 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 1 Realisasi Capaian Target Kinerja Keuangan (Pendapatan) SKPD

No.	Jenis Pendapatan	Anggaran	Realisasi	%
1	Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00
	Pajak Hotel	0,00	0,00	0,00
	Dst	0,00	0,00	0,00
2	Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00
	Retribusi Pelayanan Persampahan	0,00	0,00	0,00
Jumlah		0,00	0,00	0,00

Tabel 2. 2 Realisasi Capaian Target Kinerja Keuangan (Belanja) SKPD

No.	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	26.750.141.124,00	21.805.327.634,00	81.51%
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	424.829.000,00	259.670.312,00	61.12%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	266.130.000	134.148.230	50.40%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	74.704.000	66.314.082	88.76%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan selain Renstra PD dan Renja PD	83.995.000	59.208.000	70.48%
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	19.037.841.469,00	15.606.268.535,00	81.97%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	18.662.677.469	15.328.527.640	82.13%
	Pelaksanaan Penata Usahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	375.164.000	277.740.895	74.03%
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	324.561.100,00	289.180.000,00	89.09%
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	262.901.100	256.260.000	97.47%
	Monitoring , Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	33.660.000	17.920.000	53.23%
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	28.000.000	15.000.000	53.57%

No.	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
	Berdasarkan Tugas dan Fungsi			
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.789.092.351,00	2.547.287.739,00	91.33%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.041.122.479	1.879.759.254	92.09%
	Penyedia Peralatan Rumah Tangga	313.134.672	294.284.751	93.98%
	Penyedia Bahan Logistik Kantor	56.631.200	54.358.000	95.98%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	378.204.000	318.885.734	84.31%
5	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	42.075.000,00	29.620.000,00	70.39%
	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Baeang Milik Daerah pada SKPD	42.075.000	29.620.000	70.39%
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.048.801.599,00	1.521.388.432,00	74.25%
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.147.200.000	1.091.481.004	95.14%
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	901.601.599	429.907.428	47.68%
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	972.080.007,00	592.497.768,00	60.95%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Kendaraan Dinas Jabatan	23.989.000	17.275.550	72.01%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	446.865.328	94.441.800	21.13%
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	501.225.679	480.780.418	95.92%
8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.110.860.598,00	959.414.848,00	86.36%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.110.860.598	959.414.848	86.36%

No.	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	2.794.155.880,00	2.530.938.838,00	90.57%
9	Pengelolaan Penangkapan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang adapat diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	474.689.400,00	275.651.300,00	85.06%
	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	363.347.000	185.306.900	50.99%
	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	111.342.400	90.344.400	81.14%
10	Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.319.466.480,00	2.255.287.538,00	97.23%
	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	2.319.466.480	2.255.287.538	97.23%
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	32.074.392.233,00	25.986.980.677,00	81.02%
11	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	31.107.913.973,00	25.316.873.255,00	81.38%
	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	30.460.394.297	25.089.437.707	82.36%
	Pengelolaan Kesehatan ikan dan lingkungan budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	516.018.676	157.963.148	30.61%
	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota	131.501.000	69.472.400	52.83%
12	Pemberdayaan Pembudidaya Ikan kecil	966.478.260,00	670.107.422,00	69.33%
	Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil	768.073.000	586.379.272	76.34%
	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	84.764.160	30.108.000	35.51%
	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	113.677.100	53.620.150	47.16%
	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	335.619.140,00	327.946.900,00	97.91%

No.	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
13	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air lainnya yang Dapat diusahakan dalam Kabupaten/Kota	335.619.140,00	327.946.900,00	97.91%
	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan sesuai kewenangan Kabupaten/Kota	161.989.000	157.066.450	96.96%
	Pengawasan Usaha Pemasaran Hasil Perikanan dan atau Pengolahan sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota	173.630.140	170.880.450	98.41%
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	1.270.505.104,00	1.231.821.800,00	96.95%
14	Penerbitan Tanda daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi usaha skala Mikro dan kecil	133.603.714,00	127.057.000,00	95.09%
	Penyediaan dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam Satu (1) Daerah Kabupaten / Kota	133.603.714	127.057.000	95.09%
15	Pembinaan Mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran Skala Mikro dan kecil	381.455.000,00	375.570.700,00	98.45%
	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Resiko	381.455.000	375.570.700	98.45%
16	Penyedia dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	755.446.390,00	729.194.100,00	96.52%
	Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	755.446.390,00	729.194.100,00	96.52%
	UPT BBI KALIORANG	197.323.000,00	184.573.900,00	93.53%
17	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	128.117.000,00	123.559.400	96.44%

No.	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil (UPT Balai Benih Ikan Kaliorang)	128.117.000	123.559.400	96.44%
18	Administrasi Umum Perangkat Daerah	52.206.000,00	46.246.000	88.58%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (UPT. Balai Benih Ikan Kaliorang)	52.206.000	46.246.000	88.58%
19	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	17.000.000,00	14.768.500	86.87%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (UPT. Balai Benih Ikan Kaliorang)	17.000.000	14.768.500	86.87%
	UPT BBU TELUK LOMBOK	45.353.900,00	35.918.500	79.19%
20	Administrasi Kepengawaaian Perangkat Daerah	45.353.900	35.918.500	79.19%
	Pendidikan dan Pelatihan Pengawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (UPT. Balai Benih Udang Teluk Lombok)	45.353.900	35.918.500	79.19%
	UPT BBIAL SANGKIMA	205.611.000,00	178.608.620,00	86.86%
21	Pemberdayaan Pembudidaya Ikan kecil	65.503.000.00	64.569.820	98.57%
	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	65.503.000.00	64.569.820	98.57%
22	Administrasi Kepengawaaian Perangkat Daerah	44.582.000,00	18.554.800	41.61%
	Pendidikan dan Pelatihan Pengawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (UPT. Balai Benih Ikan Air Laut Teluk Kaba)	44.582.000	18.554.800	41.61%

No.	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
23	Administrasi Umum Perangkat Daerah	95.526.000,00	95.484.000	99.95%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (UPT. Balai Benih Ikan Kaliorang)	95.526.000,00	95.484.000	99.95%
	UPT TPI KENYAMUKAN	203.261.000,00	166.068.267,00	81.70%
24	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) (UPT. TPI Kenyamukan)	203.261.000,00	166.068.267,00	81.70%
	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) (UPT.TPI Kenyamukan)	203.261.000	166.068.267	81.70%
	UPT TPI SANGKULIRANG	151.425.700,00	120.877.740,00	79.82%
25	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) (UPT. TPI Sangkulirang)	151.425.700,00	120.877.740	79.82%
	Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) (UPT. TPI Sangkulirang)	151.425.700	120.877.740	79.82%
Jumlah		64.027.788.081,00	52.569.092.876,00	82.10%

2.1 Hambatan dan Kendala dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan pada Dinas Perikanan antara lain :

1. Keterbatasan SDM, Kompetensi aparatur dalam pengelolaan keuangan belum merata, sehingga memengaruhi kualitas perencanaan dan pelaporan. Pegawai yang belum sepenuhnya memahami standar akuntansi pemerintah (SAP) dan regulasi terbaru, sehingga terjadi kesalahan pencatatan atau keterlambatan laporan. Perlu peningkatan pengetahuan dan sumberdaya Manusia dalam hal ini pemahaman tugas dan fungsi sesuai jabatan dan tanggungjawabnya.
2. Perubahan kebijakan pusat/daerah, adanya regulasi baru atau penyesuaian kebijakan fiskal dapat menghambat pencapaian target yang sudah ditetapkan (efisiensi anggaran, pergeseran dan perubahan anggaran).
3. Realisasi belanja tidak optimal, sehingga program dan kegiatan tidak berjalan maksimal.
4. Koordinasi antar-bidang yang kurang efektif, menyebabkan inkonsistensi data.

BAB III

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

3.1 Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

3.1.1 Pendapatan-LRA

Anggaran dan Realisasi pendapatan pada tahun anggaran 2025 pada Dinas Perikanan Kab. Kutai Timur adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Realisasi Pendapatan Dinas Perikanan TA. 2025 dan TA. 2025

Realisasi tahun anggaran 2025 sebesar Rp 52.569.092.876,00 atau 82.10% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp 64.027.788.081,00. Hal ini berarti, terjadi kenaikan sebesar Rp 5.795.075.354,00 atau 42,68% jika dibanding dengan tahun 2025 yang sebesar Rp 46.774.017.522,00. Hal ini dikarenakan Tingkat penyerapan anggaran lebih baik dibanding tahun 2025, sehingga realisasi mendekati target yang ditetapkan dan Adanya proyek baru atau lanjutan yang bersifat prioritas dan strategis, sehingga menambah beban belanja.

3.1.2 Belanja

Belanja pada Dinas Perikanan terdiri dari belanja operasi yaitu belanja pegawai dan belanja barang dan jasa, kemudian belanja modal yang terdiri dari belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan, belanja modal aset tetap lainnya dan belanja modal aset lainnya. Laporan realisasi anggaran belanja dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. 2 Realisasi Belanja Dinas Perikanan TA. 2025 dan TA. 2025

No.	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025		Realisasi 2025
			(Rp)	%	
1	Belanja Operasi	60.829.176.840,00	49.643.429.725,00	81,61	42.521.094.990,00
	Belanja Pegawai	18.662.677.469,00	15.328.020.640,00	15.328.020.640,00	10.559.805.538,00
	Belanja Barang dan Jasa	42.166.499.371,00	34.315.409.085,00	34.315.409.085,00	30.521.361.702,00
2	Belanja Modal	3.198.611.241,00	2.925.156.151,00	91,45	4.252.922.532,00
	Belanja Peralatan dan Mesin	2.259.783.962,00	2.014.468.305,00	2.014.468.305,00	2.339.791.551,00
	Belanja Gedung dan Bangunan	938.827.279,00	910.687.846,00	910.687.846,00	202.978.615,00
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	4.850.000,00
	Belanja Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	1.705.302.366,00

No.	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025		Realisasi 2025
			(Rp)	%	
	Jumlah	64.027.788.081,00	52.568.585.876,00	82,10	46.774.017.522,00

Realisasi belanja tahun anggaran 2025 sebesar Rp52.568.585.876.00 atau 82,10% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp64.027.788.081,00. Hal ini berarti, terjadi kenaikan belanja sebesar Rp11.459.202.205,00 atau 12% jika dibanding dengan belanja tahun 2025 yang sebesar Rp7.817.127.771,55.

3.1.2.1 Belanja Pegawai

Belanja pegawai Dinas Perikanan dapat dilihat pada tabel di bawah ini secara rinci sebagai berikut :

Tabel 3. 3 Realisasi Belanja Pegawai Dinas Perikanan TA. 2025 dan TA. 2025

No.	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025		Realisasi 2025
			(Rp)	%	
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	6.069.020.063,00	4.108.488.854,00	67,70	4.108.488.854,00
	Belanja Gaji Pokok PNS	3.360.000.000,00	2.680.798.440,00	2.680.798.440,00	23.884.183.940,00
	Belanja Gaji Pokok PPPK	960.000.000,00	538.619.400,00	538.619.400,00	-
	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	350.000.000,00	240.759.628,00	240.759.628,00	230.843.528,00
	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	140.000.000,00	56.348.770,00	56.348.770,00	-
	Belanja Tunjangan Jabatan	365.000.000,00	146.705.000,00	146.705.000,00	202.870.000,00
	Belanja Tunjangan Fungsional	225.000.000,00	125.840.000,00	125.840.000,00	6.900.000,00
	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	87.000.000,00	61.470.000,00	70,66	-
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum	235.000.000,00	69.650.000,00	29,64	162.754.636,00
	Belanja Tunjangan Beras PNS	250.000.000,00	142.522.560,00	57,01	149.764.560,00
	Belanja Tunjangan Beras PPPK	87.000.000,00	40.917.300,00	47,03	-
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	5.000.000,00	4.816.238,00	96,32	2.000.000,00
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	4.200.000,00	-	-	-

No.	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025		Realisasi 2025
			(Rp)	%	
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	400.063,00	30.930,00	7,73	36.136,00
	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	420.000,00	10.588,00	2,52	-
2	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	8.942.456.718,00	6.098.076.684,00	68,19	4.861.942.849,00
	Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS	7.832.456.718,00	5.510.076.684,00	70,35	4.777.942.849,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	1.110.000.000,00	588.000.000,00	52,97	84.000.000,00
Jumlah		70.701.983.688,00	68.702.143.788,00	97,17	54.133.680.596,00

Realisasi belanja pegawai tahun anggaran 2025 sebesar Rp15.328.020.640,00 atau 82.13% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp18.662.677,00. Hal ini berarti, terjadi kenaikan belanja pegawai sebesar Rp4.768.215.102,00 atau 32.09% jika dibanding dengan belanja tahun 2024 yang sebesar Rp10.559.805.538,00

3.1.2.2 Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa Dinas Perikanan secara rinci dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3. 4 Realisasi Belanja Barang dan Jasa Dinas Perikanan TA. 2025 dan TA. 2025

No.	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025		Realisasi 2025
			(Rp)	%	
1	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	0,00	0,00	0,00	353.240.000,00
2	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	0,00	0,00	-	0,00
3	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	10.567.000,00	10.452.000,00	98,91	33.661.520,00
4	Belanja Bahan-Bahan Kimia	25.883.000,00	19.429.000,00	75,06	6.858.000,00
4	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	73.471.900,00	25.438.750,00	34,62	7.548.729,00
5	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	0,00	0,00	0,00	9.957.500,00
6	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	1.398.000,00	1.398.000,00	100,00	0,00
7	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	12.105.000,00	9.000.000,00	74,34	42.040.000,00

No.	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025		Realisasi 2025
			(Rp)	%	
8	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	68.897.900,00	45.591.000,00	66,17	21.040.160,00
9	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	190.876.480,00	66.766.120,00	34,97	28.720.000,00
10	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	0,00	0,00	0,00	5.355.000,00
11	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	18.484.471	0,00	0,00	0,00
12	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	0,00	0,00	0,00	5.560.000,00
13	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	1.239.480,00	0,00	0,00	0,00
14	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	244.151.016,00	156.967.000,00	64,29	155.069.105,00
15	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	107.183.000,00	92.768.000,00	86,55	182.086.336,00
16	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	72.719.140,00	60.664.000,00	83,42	197.430.268,00
17	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	48.544.000,00	35.998.000,00	74,15	54.433.100,00
18	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	111.441.844,00	78.758.000,00	70,67	100.617.574,00
19	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	61.848.512,00	46.953.000,00	75,91	65.936.900,00
20	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	32.432.000,00	32.184.000,00	99,23	30.200.500,00
21	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	46.642.340,00	45.176.350,00	96,84	129.732.750,00
22	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	0,00	0,00	0,00	278.200.000,00
23	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	319.073.000,00	245.865.700,00	77,05	484.630.000,00
24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	14.898.948,00	9.400.000,00	63,09	65.449.000,00
25	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	64.865.000,00	40.395.000,00	62,27	11.759.000,00
26	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	29.796.076.842,00	25.139.221.771,00	84,37	15.813.087.909,00
27	Belanja Natura dan Pakan-Natura	50.787.000,00	46.720.000,00	91,99	0,00
28	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	45.981.000,00	45.771.000,00	99,45	33.560.000,00
29	Belanja Natura dan Pakan- Natura dan Pakan Lainnya	6.526.745,00	0,00	0,00	0,00
30	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	68.148.600,00	34.527.000,00	50,66	293.808.756,00
31	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	106.141.200,00	105.320.000,00	99,23	8.915.000,00
32	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	118.800.000,00	116.550.000,00	98,10	32.000.000,00
33	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	9.860.800,00	9.645.000,00	97,81	605.926.950,00
34	Belanja Pakaian KORPRI	78.763.500,00	76.590.000,00	97,24	0,00
35	Belanja Pakaian Adat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Belanja Pakaian Batik Tradisional	0,00	0,00	0,00	57.700.000,00

No.	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025		Realisasi 2025
			(Rp)	%	
37	Belanja Pakaian Olahraga	9.000.000,00	8.775.000,00	97,50	110.680.000,00
38	Belanja Pakaian Jas/Safari	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	56.150.000,00	54.450.000,00	96,97	242.300.000,00
40	Honorarium Rohaniwan	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
41	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	6.316.000,00	0,00	0,00	610.000,00
42	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	732.739.500,00	700.874.848,00	95,65	2.003.973.938,00
44	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	0,00	0,00	0,00	500.000,00
46	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	136.000.000,00	136.000.000,00	100,00	70.500.000,00
47	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	80.000.000,00	80.000.000,00	100,00	61.500.000,00
48	Belanja Jasa Tenaga Supir	59.640.000,00	59.640.000,00	100,00	28.000.000,00
49	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
50	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	26.300.000,00	8.411.000,00	31,98	0,00
52	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	15.561.000,00	15.560.000,00	99,99	18.110.000,00
53	Belanja Jasa Kalibrasi	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
54	Belanja Tagihan Telepon	0,00	0,00	0,00	4.273.500,00
55	Belanja Tagihan Air	6.000.000,00	4.682.200,00	78,03	1.737.400,00
56	Belanja Tagihan Listrik	27.800.000,00	11.330.837,00	40,75	8.824.000,00
57	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	9.600.000,00	8.283.100,00	86,28	3.196.800,00
58	Belanja Paket/Pengiriman	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	16.300.000,00	6.917.480,00	42,43	4.266.800,00
60	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	465.840.000,00	382.970.000,00	82,21	0,00
61	Belanja Sewa Lapangan Olahraga	24.000.000,00	22.500.000,00	93,75	0,00
62	Belanja Sewa Lapangan Lainnya	45.650.000,00	25.600.000,00	56,07	0,00
63	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	1.147.200.000,00	1.091.481.004,00	95,14	462.000.000,00
65	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	6.127.200,00	6.100.000,00	99,55	0,00
66	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00

No.	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025		Realisasi 2025
			(Rp)	%	
67	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
68	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga	0,00	0,00	0,00	24.000.000,00
69	Belanja Sewa Taman	0,00	0,00	0,00	5.800.000,00
70	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	0,00	0,00	53.560.000,00
71	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	0,00	0,00	0,00	625.274.100,00
72	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	463.999.999,00	0,00	0,00	0,00
73	Belanja Jasa Konsultansi Perencana Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	489.090.000,00	292.904.130,00	59,88	0,00
74	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	285.740.000,00	0,00	0,00	0,00
75	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Belanja Sosialisasi	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00
77	Belanja Bimbingan Teknis	2.061.500.000,00	1.847.270.000,00	89,61	864.200.000,00
78	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	30.000.000,00	19.013.000,00	63,38	25.755.000,00
79	Belanja Bimbingan Teknis	1.188.000.000,00	1.130.600.000,00	95,16	1.847.270.000,00
80	Belanja Sewa Aset tidak Berwujud Software	2.391.000,00	0,00	0,00	0,00
81	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	0,00	0,00	0,00	19.013.000,00
82	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	136.040.000,00	20.796.000,00	15,28	0,00
83	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	66.600.000,00	5.285.000,00	7,93	4.780.000,00
84	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	17.080.000,00	15.320.000,00	89,69	7.700.000,00
86	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	0,00	0,00	0,00
87	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lain	0,00	0,00	0,00	6.438.000,00
88	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	38.690.000,00	2.580.000,00	6,66	0,00
89	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	45.540.000,00	1.500.000,00	3,29	900.000,00

No.	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025		Realisasi 2025
			(Rp)	%	
90	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	0,00	0,00	177.832.577,00
91	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3.261.404.000,00	2.782.131.974,00	85,30	4.693.992.935,00
92	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.489.207.160,00	843.204.815,00	58,62	1.204.744.595,00
93	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	0,00	0,00	0,00	32.100.000,00
94	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	0,00	0,00	0,00	36.000.000,00
95	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	0,00	0,00	0,00	1.439.927.750,00
Jumlah		60.829.176.840,00	49.643.429.725,00	81,61	42.521.094.990,00

Realisasi belanja barang dan jasa tahun anggaran 2025 sebesar Rp 34.315.409.085,00 atau 81,38% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp 42.166.499.371,00. Hal ini berarti, terjadi Kenaikan belanja barang dan jasa sebesar Rp 3.794.047.383,00 atau 12.05% jika dibanding dengan belanja tahun 2024 yang sebesar Rp 30.521.361.702,00.

3.1.2.3 Belanja Modal

Jumlah belanja modal pada Dinas Perikanan secara rinci dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3. 5 Realisasi Belanja Modal Dinas Perikanan TA. 2025 dan TA. 2025

No.	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025		Realisasi 2025
			(Rp)	%	
1	Belanja Peralatan dan Mesin	2.259.783.962,00	2.014.468.305,00	89,14	2.339.791.551,00
	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	0,00	0,00	0,00	76.420.000,00
	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	0,00	0,00	0,00	1.124.000.000,00
	Belanja Modal Alat Produksi Perikanan	20.625.000,00	17.705.000,00	85,84	34.400.000,00
	Belanja Modal Alat Pengolahan Lainnya	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00
	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	142.827.750,00	135.740.000,00	95,03	66.631.520,00
	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	85.811.000,00	85.400.000,00	95,46	92.717.774,00
	Belanja Modal Mebel	63.444.000,00	62.000.000,00	97,72	72.000.000,00
	Belanja Modal Alat Pendingin	161.273.800,00	151.255.550,00	93,78	32.231.405,00

No.	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025		Realisasi 2025
			(Rp)	%	
	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	279.562.650,00	257.618.751,00	92,15	68.929.760,00
	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00
	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruang Pejabat	0,00	0,00	87,52	34.000.000,00
	Belanja Modal Peralatan Studio, Video dan Film	40.614.000,00	39.500.000,00	97,25	0,00
	Belanja Modal Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	0,00	0,00	0,00	36.260.000,00
	Belanja Modal Humidity Control	0,00	0,00	0,00	3.250.000,00
	Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	129.363.368,00	0,00	0,00	0,00
	Belanja Modal Alat Laboratorium Lain	0,00	0,00	0,00	132.107.400,00
	Belanja Modal Personal Computer	993.547.200,00	942.100.000,00	94,82	387.769.595,00
	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	295.881.194,00	276.749.004,00	93,53	64.672.247,00
	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	15.250.000,00	15.000.000,00	98,36	104.001.850,00
	Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi Lainnya	31.584.000,00	31.400.000,00	99,41	0,00
2	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	938.827.279,00	910.687.846,00	97,00	202.978.615,00
	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	938.827.279,00	910.687.846,00	97,00	202.978.615,00
3	Belanja Modal Tanaman	0,00	0,00	0,00	4.850.000,00
	Belanja Modal Tanaman	0,00	0,00	0,00	4.850.000,00
4	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	1.705.302.366,00
	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Kajian	0,00	0,00	94,76	1.705.302.366,00
Jumlah		3.198.611.241,00	2.925.156.151,00	91,45	4.252.922.532,00

Realisasi belanja modal tahun anggaran 2025 sebesar Rp 2.925.156.151,00. atau 91,45% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp 3.198.611.241,00. Hal ini berarti, terjadi Penurunan belanja modal sebesar Rp1.327.766.381,00 atau 31,22 % jika dibanding dengan belanja tahun 2025 yang sebesar Rp4.252.922.532,00.

3.2 Penjelasan atas Pos-pos Neraca

3.2.1 Aset Lancar

Aset lancar adalah sumber daya ekonomis yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai dalam satu tahun periode akuntansi. Total aset lancar yang dimiliki oleh Dinas Perikanan per 31 Desember 2025 terdiri dari :

Tabel 3. 6 Aset Lancar Dinas Perikanan TA. 2025 dan TA. 2025

No.	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2025	Saldo Per 31 Desember 2025
1	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
2	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
3	Kas di BLUD	0,00	0,00
4	Kas di Bendahara FKTP	0,00	0,00
5	Kas Lainnya	150.128.247,00	150.128.247,00
6	Piutang Pendapatan	0,00	0,00
7	Persediaan	0,00	0,00
Jumlah Aset Lancar		20.746.509.247,67	8.496.677.404,93

a. Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo kas pada Bendahara Penerimaan Dinas Perikanan per 31 Desember 2025 sebesar Rp 0,00.

b. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo kas pada Bendahara Pengeluaran Dinas Perikanan per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00.

c. Kas di BLUD

Saldo Kas pada BLUD Dinas Perikanan per 31 Desember 2025 sebesar Rp 0,00

d. Piutang Pendapatan

Saldo piutang pendapatan pada Dinas Perikanan per 31 Desember 2025 sebesar Rp 0,00

e. Penyisihan Piutang

Saldo penyisihan piutang pendapatan pada Dinas Perikanan per 31 Desember 2025 sebesar Rp 0,00

f. Persediaan

Saldo persediaan pada Dinas Perikanan per 31 Desember 2025 sebesar Rp 26.523.047.801,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 3. 7 Rekapitulasi Persediaan Dinas Perikanan TA. 2025 dan TA.
2025**

NO	URAIAN	SALDO AWAL 2025	BELANJA PERSEDIAAN	PEMAKAIAN PERSEDIAAN	REKLASIFIKASI BELANJA DILUAR BELANJA PERSEDIAAN	SALDO AKHIR PERSEDIAAN
1	PERSEDIAAN BARANG PAKAI HABIS					
	Bahan	0.00	111.308.750,00	111.308.750,00	0.00	0.00
	Suku Cadang	0.00	66.766.120,00	66.766.120,00	0.00	0.00
	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	0.00	1.016.288.050,00	1.016.288.050,00	0.00	0.00
	Obat-Obatan	0.00	40.395.000,00	40.395.000,00	0.00	0.00
	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan	0.00	25.055.982.881,00	25.055.982.881,00	0.00	0.00
	Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Natura Dan Pakan	0.00	232.307.000,00	232.307.000,00	0.00	0.00
	Persediaan Penelitian	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Persediaan Dalam Proses	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00
	JUMLAH	0.00	26.523.047.801,00	26.523.047.801,00	0,00	0.00
2	PERSEDIAAN BARANG TAK PAKAI HABIS					
	KOMPONEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	P I P A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	JUMLAH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	PERSEDIAAN BARANG BEKAS DIPAKAI					
	Komponen Bekas Dan Pipa Bekas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	JUMLAH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	JUMLAH PERSEDIAAN (1+2+3)	0.00	26.523.047.801,00	26.523.047.801,00	0.00	0.00

Jumlah persediaan sebesar Rp 26.523.047.801,00 terdiri dari persediaan bahan pakai habis sebesar Rp 26.523.047.801,00.

3.2.2 Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi atau setahun yang kepemilikannya digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Aset tetap yang dimiliki Dinas Perikanan dan per 31 Desember 2025 dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3. 8 Aset Tetap Dinas Perikanan TA. 2025 dan TA. 2025

Uraian	Saldo Per 31 Desember 2025	Saldo Per 31 Desember 2025	Selisih
Tanah	5.801.678.000,00	5.801.678.000,00	0,00
Peralatan dan Mesin	13.654.130.458,29	11.718.779.153,29	1.935.351.305,00
Gedung dan Bangunan	17.713.988.959,00	16.803.301.113,00	910.687.846,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	6.268.866.220,00	6.268.866.220,00	0,00

Uraian	Saldo Per 31 Desember 2025	Saldo Per 31 Desember 2025	Selisih
Aset Tetap Lainnya	26.913.000,00	26.913.000,00	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	(17.408.904.985,83)	(15.431.731.190,60)	0,00
Jumlah	26.056.671.651,46	25.187.806.295,69	2.846.039.151,00

Penjelasan atas aset tetap dari tabel di atas sebagai berikut :

a. Tanah

Nilai aset tanah per 31 Desember 2025 sebesar Rp 5.801.678.000,00 adalah nilai jumlah tanah yang tercantum dalam laporan penilaian aset Milik Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Timur bila dibandingkan tahun 2025 tidak ada peningkatan untuk aset tanah ini. Nilai yang tercantum pada Laporan penilaian merupakan rekapitulasi nilai dari hasil inventarisasi dan penilaian yang sesuai dengan standar pemerintah yang dimiliki Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Timur sesuai dengan neraca.

Saldo Per 31 Desember 2025	Rp	5.801.678.000.00
Mutasi Tambah	Rp	0.00
Mutasi Kurang	Rp	0.00
Saldo Akhir per 31 Desember 2025	Rp	5.801.678.000.00
Akumulasi Penyusutan	Rp	0.00
Nilai Buku Per 31 Desember 2025	Rp	5.801.678.000.00

Adapun mutasi tambah dapat dirincikan sebagai berikut:

Koreksi Atas Saldo Awal	Rp	0.00
LRA Belanja Modal	Rp	0,00
LRA Belanja Barang dan Jasa Yang Menjadi Aset Tetap (Kesalahan Penganggaran)	Rp	0.00
LRA Belanja Modal Reklasifikasi Sesama Aset Tetap	Rp	0.00
Hasil Inventarisasi (Sensus)	Rp	0.00
Hibah	Rp	0.00
Utang Belanja Modal	Rp	0.00
Mutasi Masuk Antar SKPD	Rp	0.00
Koreksi BPK	Rp	0.00
Jumlah Mutasi Tambah	Rp	0.00

Adapun mutasi kurang dapat dirincikan sebagai berikut :

Pembayaran Utang Belanja Modal	Rp	0.00
LRA Belanja Modal - Utang Belanja Modal	Rp	0.00
LRA Belanja Modal - Yang Tidak Menjadi Aset Tetap (Kesalahan Penganggaran)	Rp	0.00

LRA Belanja Modal - Reklasifikasi Sesama Aset Tetap	Rp	0.00
LRA Belanja Modal - Yang Tidak Menjadi Aset Tetap (Di bawah Nilai Kapitalisasi)	Rp	0.00
LRA Belanja Modal - Yang Tidak Menjadi Aset Tetap (Diserahkan Ke Masyarakat)	Rp	0.00
Hasil Inventarisasi (Sensus)	Rp	0.00
Hibah	Rp	0.00
Penghapusan	Rp	0.00
Mutasi Keluar Antar SKPD	Rp	0.00
Koreksi BPK	Rp	0.00
Jumlah Mutasi Kurang	Rp	0.00

b. Peralatan dan Mesin

Nilai aset untuk peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 sebesar Rp13.654.130.458,29 antara lain alat berat, alat angkutan, peralatan rumah tangga alat medis dan alat laboratorium yang tercantum dalam laporan penilaian aset Milik Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Timur. Nilai yang tercantum pada Laporan penilaian merupakan rekapitulasi nilai dari hasil inventarisasi dan penilaian yang sesuai dengan standar pemerintah yang dimiliki Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Timur, bila dibandingkan nilai aset tahun 2025 Rp11.718.779.153,29 terjadi peningkatan sebesar Rp 1.935.351.305,00.

Saldo Per 31 Desember 2025	Rp	11.718.779.153,29
Mutasi Tambah	Rp	2.014.468.305,00
Mutasi Kurang	Rp	79.117.000,00
Saldo Akhir per 31 Desember 2025	Rp	13.654.130.458,29
Akumulasi Penyusutan	Rp	0.00
Nilai Buku Per 31 Desember 2025	Rp	13.654.130.458,29

Adapun mutasi tambah dapat dirincikan sebagai berikut:

Koreksi Atas Saldo Awal	Rp	0.00
LRA Belanja Modal	Rp	2.014.468.305,00
LRA Belanja Barang dan Jasa Yang Menjadi Aset Tetap (Kesalahan Penganggaran)	Rp	0.00
LRA Belanja Modal Reklasifikasi Sesama Aset Tetap	Rp	0.00
Hasil Inventarisasi (Sensus)	Rp	0.00
Hibah	Rp	0.00
Utang Belanja Modal	Rp	0.00
Mutasi Masuk Antar SKPD	Rp	0.00
Koreksi BPK	Rp	0.00

Jumlah Mutasi Tambah	Rp	2.014.468.305,00
Adapun mutasi kurang dapat dirincikan sebagai berikut :		
Pembayaran Utang Belanja Modal	Rp	0.00
LRA Belanja Modal - Utang Belanja Modal	Rp	0.00
LRA Belanja Modal - Yang Tidak Menjadi Aset Tetap (Kesalahan Penganggaran)	Rp	0.00
LRA Belanja Modal - Reklasifikasi Sesama Aset Tetap	Rp	0.00
LRA Belanja Modal - Yang Tidak Menjadi Aset Tetap (Di bawah Nilai Kapitalisasi)	Rp	0.00
LRA Belanja Modal - Yang Tidak Menjadi Aset Tetap (Diserahkan Ke Masyarakat)	Rp	0.00
Hasil Inventarisasi (Sensus)	Rp	79.117.000,00
Hibah	Rp	0.00
Penghapusan	Rp	0.00
Mutasi Keluar Antar SKPD	Rp	0.00
Koreksi BPK	Rp	0.00
Jumlah Mutasi Kurang	Rp	79.117.000,00

c. Gedung dan Bangunan

Nilai aset Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 sebesar Rp17.713.988.959,00 adalah nilai jumlah gedung dan bangunan yang tercantum dalam laporan penilaian aset Milik Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Timur. Nilai yang tercantum pada laporan penilaian merupakan rekapitulasi nilai dari hasil inventarisasi dan penilaian yang sesuai dengan standar pemerintah yang dimiliki Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Timur. Bila dibandingkan dengan jumlah aset tahun 2025 sebesar Rp16.803.301.113,00 ada kenaikan sebesar Rp910.687.846,00.

Saldo Per 31 Desember 2025	Rp	16.803.301.113,00
Mutasi Tambah	Rp	910.687.846,00
Mutasi Kurang	Rp	0.00
Saldo Akhir per 31 Desember 2025	Rp	17.713.988.959,00
Akumulasi Penyusutan	Rp	0.00
Nilai Buku Per 31 Desember 2025	Rp	17.713.988.959,00

Adapun mutasi tambah dapat dirincikan sebagai berikut:

Koreksi Atas Saldo Awal	Rp	0.00
LRA Belanja Modal	Rp	910.687.846,00
LRA Belanja Barang dan Jasa Yang Menjadi Aset Tetap (Kesalahan Penganggaran)	Rp	0.00

LRA Belanja Modal Reklasifikasi Sesama Aset Tetap	Rp	0.00
Hasil Inventarisasi (Sensus)	Rp	0.00
Hibah	Rp	0.00
Utang Belanja Modal	Rp	0.00
Mutasi Masuk Antar SKPD	Rp	0.00
Koreksi BPK	Rp	0.00
Jumlah Mutasi Tambah	Rp	910.687.846,00

Adapun mutasi kurang dapat dirincikan sebagai berikut :

Pembayaran Utang Belanja Modal	Rp	0.00
LRA Belanja Modal - Utang Belanja Modal	Rp	0.00
LRA Belanja Modal - Yang Tidak Menjadi Aset Tetap (Kesalahan Penganggaran)	Rp	0.00
LRA Belanja Modal - Reklasifikasi Sesama Aset Tetap	Rp	0.00
LRA Belanja Modal - Yang Tidak Menjadi Aset Tetap (Di bawah Nilai Kapitalisasi)	Rp	0.00
LRA Belanja Modal - Yang Tidak Menjadi Aset Tetap (Diserahkan Ke Masyarakat)	Rp	0.00
Hasil Inventarisasi (Sensus)	Rp	0.00
Hibah	Rp	0.00
Penghapusan	Rp	0.00
Mutasi Keluar Antar SKPD	Rp	0.00
Koreksi BPK	Rp	0.00
Jumlah Mutasi Kurang	Rp	0.00

d. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Nilai aset Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025 sebesar Rp6.268.866.220,00 adalah nilai jumlah jaringan yang tercantum dalam laporan penilaian aset Milik Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Timur. Nilai yang tercantum pada laporan penilaian merupakan rekapitulasi nilai dari hasil inventarisasi dan penilaian yang sesuai dengan standar pemerintah yang dimiliki Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Timur. Jalan, irigasi dan jaringan tidak mengalami kenaikan dari tahun 2025.

Saldo Per 31 Desember 2025	Rp	6.268.866.220,00
Mutasi Tambah	Rp	0.00
Mutasi Kurang	Rp	0.00
Saldo Akhir per 31 Desember 2025	Rp	6.268.866.220,00
Akumulasi Penyusutan	Rp	0.00
Nilai Buku Per 31 Desember 2025	Rp	6.268.866.220,00

Adapun mutasi tambah dapat dirincikan sebagai berikut:

Koreksi Atas Saldo Awal	Rp	0.00
-------------------------	----	------

LRA Belanja Modal	Rp	0.00
LRA Belanja Barang dan Jasa Yang Menjadi Aset Tetap (Kesalahan Penganggaran)	Rp	0.00
LRA Belanja Modal Reklasifikasi Sesama Aset Tetap	Rp	0.00
Hasil Inventarisasi (Sensus)	Rp	0.00
Hibah	Rp	0.00
Utang Belanja Modal	Rp	0.00
Mutasi Masuk Antar SKPD	Rp	0.00
Koreksi BPK	Rp	0.00
Jumlah Mutasi Tambah	Rp	0.00

Adapun mutasi kurang dapat dirincikan sebagai berikut :

Pembayaran Utang Belanja Modal	Rp	0.00
LRA Belanja Modal - Utang Belanja Modal	Rp	0.00
LRA Belanja Modal - Yang Tidak Menjadi Aset Tetap (Kesalahan Penganggaran)	Rp	0.00
LRA Belanja Modal - Reklasifikasi Sesama Aset Tetap	Rp	0.00
LRA Belanja Modal - Yang Tidak Menjadi Aset Tetap (Di bawah Nilai Kapitalisasi)	Rp	0.00
LRA Belanja Modal - Yang Tidak Menjadi Aset Tetap (Diserahkan Ke Masyarakat)	Rp	0.00
Hasil Inventarisasi (Sensus)	Rp	0.00
Hibah	Rp	0.00
Penghapusan	Rp	0.00
Mutasi Keluar Antar SKPD	Rp	0.00
Koreksi BPK	Rp	0.00
Jumlah Mutasi Kurang	Rp	0.00

e. Aset Tetap Lainnya

Nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 sebesar Rp26.913.000,00 adalah nilai jumlah aset tetap lainnya yang tercantum dalam laporan penilaian aset Milik Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Timur. Aset Tetap Lainnya tidak mengalami kenaikan dari tahun 2025.

Saldo Per 31 Desember 2025	Rp	26.913.000,00
Mutasi Tambah	Rp	0.00
Mutasi Kurang	Rp	0.00
Saldo Akhir per 31 Desember 2025	Rp	26.913.000,00
Akumulasi Penyusutan	Rp	0.00
Nilai Buku Per 31 Desember 2025	Rp	26.913.000.00

Adapun mutasi tambah dapat dirincikan sebagai berikut:

Koreksi Atas Saldo Awal	Rp	0.00
LRA Belanja Modal	Rp	0.00
LRA Belanja Barang dan Jasa Yang Menjadi Aset Tetap (Kesalahan Penganggaran)	Rp	0.00
LRA Belanja Modal Reklasifikasi Sesama Aset Tetap	Rp	0.00
Hasil Inventarisasi (Sensus)	Rp	0.00
Hibah	Rp	0.00
Utang Belanja Modal	Rp	0.00
Mutasi Masuk Antar SKPD	Rp	0.00
Koreksi BPK	Rp	0.00
Jumlah Mutasi Tambah	Rp	0.00

Adapun mutasi kurang dapat dirincikan sebagai berikut :

Pembayaran Utang Belanja Modal	Rp	0.00
LRA Belanja Modal - Utang Belanja Modal	Rp	0.00
LRA Belanja Modal - Yang Tidak Menjadi Aset Tetap (Kesalahan Penganggaran)	Rp	0.00
LRA Belanja Modal - Reklasifikasi Sesama Aset Tetap	Rp	0.00
LRA Belanja Modal - Yang Tidak Menjadi Aset Tetap (Di bawah Nilai Kapitalisasi)	Rp	0.00
LRA Belanja Modal - Yang Tidak Menjadi Aset Tetap (Diserahkan Ke Masyarakat)	Rp	0.00
Hasil Inventarisasi (Sensus)	Rp	0.00
Hibah	Rp	0.00
Penghapusan	Rp	0.00
Mutasi Keluar Antar SKPD	Rp	0.00
Koreksi BPK	Rp	0.00
Jumlah Mutasi Kurang	Rp	0.00

f. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Nilai kontruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2025 sebesar Rp 0,00 yaitu beberapa pembangunan fisik yang belum bisa dimanfaatkan penggunaannya karena belum selesai. Kontruksi Dalam Pengerjaan tidak mengalami kenaikan dari tahun 2025.

Saldo Per 31 Desember 2025	Rp	0.00
Mutasi Tambah	Rp	0.00
Mutasi Kurang	Rp	0.00
Saldo Akhir per 31 Desember 2025	Rp	0.00
Akumulasi Penyusutan	Rp	0.00
Nilai Buku Per 31 Desember 2025	Rp	0.00

Adapun mutasi tambah dapat dirincikan sebagai berikut:

Koreksi Atas Saldo Awal	Rp	0.00
LRA Belanja Modal	Rp	0.00
LRA Belanja Barang dan Jasa Yang Menjadi Aset Tetap (Kesalahan Penganggaran)	Rp	0.00
LRA Belanja Modal Reklasifikasi Sesama Aset Tetap	Rp	0.00
Hasil Inventarisasi (Sensus)	Rp	0.00
Hibah	Rp	0.00
Utang Belanja Modal	Rp	0.00
Mutasi Masuk Antar SKPD	Rp	0.00
Koreksi BPK	Rp	0.00
Jumlah Mutasi Tambah	Rp	0.00

Adapun mutasi kurang dapat dirincikan sebagai berikut :

Pembayaran Utang Belanja Modal	Rp	0.00
LRA Belanja Modal - Utang Belanja Modal	Rp	0.00
LRA Belanja Modal - Yang Tidak Menjadi Aset Tetap (Kesalahan Penganggaran)	Rp	0.00
LRA Belanja Modal - Reklasifikasi Sesama Aset Tetap	Rp	0.00
LRA Belanja Modal - Yang Tidak Menjadi Aset Tetap (Di bawah Nilai Kapitalisasi)	Rp	0.00
LRA Belanja Modal - Yang Tidak Menjadi Aset Tetap (Diserahkan Ke Masyarakat)	Rp	0.00
Hasil Inventarisasi (Sensus)	Rp	0.00
Hibah	Rp	0.00
Penghapusan	Rp	0.00
Mutasi Keluar Antar SKPD	Rp	0.00
Koreksi BPK	Rp	0.00
Jumlah Mutasi Kurang	Rp	0.00

g. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Nilai Akumulasi Penyusutan sebesar Rp 17.408.904.985,83 dari sejumlah nilai aset yang diakui oleh Dinas Perikanan. Akumulasi penyusutan mengurangi nilai aset tetap dalam neraca.

Jumlah aset tetap pada Dinas Perikanan Dinas Perikanan per 31 Desember 2025 sebesar Rp 43.465.576.637,29 sebelum dikurangi nilai akumulasi penyusutan. Setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 17.408.904.985,83 nilai aset tetap menjadi sebesar Rp 28.033.845.446,69

Tabel 3. 9 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Dinas Perikanan TA. 2025 dan TA. 2025

No	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	Saldo Awal 2025	Mutasi (+)	Mutasi (-)	Saldo Akhir 2025
1	Peralatan dan Mesin	7.088.483.815,65	1.213.808.686,75	0,00	8.302.292.502,40
2	Gedung dan Bangunan	3.993.422.157,41	337.832.585,35	0.00	4.331.254.742,76
3	Jalan, Jaringan dan Irigasi	4.349.825.217,54	425.532.523,13	0.00	4.775.357.740,67
JUMLAH		15.431.731.190,60	1.977.173.795,23	0,00	17.408.904.985,83

3.2.3 Aset Lainnya

Saldo aset lainnya pada Dinas Perikanan per 31 Desember 2025 sebesar Rp 22.779.617.586,41. Jumlah aset lainnya per 31 Desember 2025 sebesar Rp 23.479.674.899,61 , terdapat mutasi penambahan dengan nilai Rp 79.117.000,00 dan mutasi penambahan akumulasi penyusutan Rp -460.625.313,20 serta mutasi kurang sebesar Rp 318.549.000,00.

Tabel 3. 10 Aset Lainnya Dinas Perikanan TA. 2025 dan TA. 2025

No	Aset Lainnya	Saldo Akhir 2025	Mutasi (+)	Mutasi (-)	Saldo Akhir 2025
1	Aset Tak Berwujud	2.311.684.566,00	0,00	0,00	2.311.684.566,00
2	Aset Lain-Lain	21.374.063.456,38	79.117.000,00	318.549.000,00	21.134.631.456,38
4	Aset Lainnya (Tuntutan Ganti Rugi)	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(206.073.122,77)	(460.625.313,20)	0,00	(666.698.435,97)
JUMLAH		23.479.674.899,61	(381.508.313,20)	318.549.000,00	22.779.617.586,41

Saldo Per 31 Desember 2025	Rp	23.479.674.899,61
Mutasi Tambah	Rp	79.117.000,00
Mutasi Kurang	Rp	318.549.000,00
Saldo Akhir per 31 Desember 2025	Rp	23.240.242.899,61
Akumulasi Penyusutan	Rp	-460.625.313,20
Nilai Buku Per 31 Desember 2025	Rp	22.779.617.586,41

Adapun mutasi tambah dapat dirincikan sebagai berikut:

Koreksi Atas Saldo Awal	Rp	0,00
-------------------------	----	------

LRA Belanja Modal	Rp	0,00
LRA Belanja Barang dan Jasa Yang Menjadi Aset Tetap (Kesalahan Penganggaran)	Rp	0,00
LRA Belanja Modal Reklasifikasi Sesama Aset Tetap	Rp	0,00
Hasil Inventarisasi (Sensus)	Rp	79.117.000,00
Hibah	Rp	0,00
Utang Belanja Modal	Rp	0,00
Mutasi Masuk Antar SKPD	Rp	0,00
Koreksi BPK	Rp	0,00
Jumlah Mutasi Tambah	Rp	79.117.000,00

Adapun mutasi kurang dapat dirincikan sebagai berikut :

Pembayaran Utang Belanja Modal	Rp	0,00
LRA Belanja Modal - Utang Belanja Modal	Rp	0,00
LRA Belanja Modal - Yang Tidak Menjadi Aset Tetap (Kesalahan Penganggaran)	Rp	0,00
LRA Belanja Modal - Reklasifikasi Sesama Aset Tetap	Rp	0,00
LRA Belanja Modal - Yang Tidak Menjadi Aset Tetap (Di bawah Nilai Kapitalisasi)	Rp	0,00
LRA Belanja Modal - Yang Tidak Menjadi Aset Tetap (Diserahkan Ke Masyarakat)	Rp	0,00
Hasil Inventarisasi (Sensus)	Rp	0,00
Hibah	Rp	0,00
Penghapusan	Rp	318.549.000,00
Mutasi Keluar Antar SKPD	Rp	0,00
Koreksi BPK	Rp	0,00
Jumlah Mutasi Kurang	Rp	318.549.000,00

3.2.6 Ekuitas

Saldo Ekuitas Kantor Dinas Perikanan per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp52.117.242.350,30

3.3 Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

3.3.1 Beban-LO

Beban-LO adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa atau biaya yang timbul akibat transaksi tersebut dalam periode laporan yang berdampak pada penurunan ekuitas, baik berupa pengeluaran, konsumsi aset, atau timbulnya kewajiban. Adapun beban-LO Dinas Perikanan per 31 Desember 2025 sebesar Rp49.223.775.721,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp 7.019.463.331,00 atau 16.63% dari Tahun 2025 sebesar Rp 42.204.312.390,00 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3. 11 Beban-LO Badan/Dinas Per 31 Desember 2025

No	Beban - LO	Saldo LO TA 2025 (Rp)	Saldo LO TA 2025 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Pegawai	15.328.020.640,00	10.559.805.538,00	4.768.215.102,00	45,15
2	Beban Barang dan Jasa	33.895.755.081,00	30.204.579.102,00	3.691.175.979,00	12,22
3	Beban Hibah	0,00	1.439.927.750,00	(1.439.927.750,00)	(100,00)
4	Beban Penyisihan Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Beban Penyusutan dan Amortisasi	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		49.223.775.721,00	42.204.312.390,00	7.019.463.331,00	16,63

a. Beban Pegawai

Secara keseluruhan Beban Pegawai Dinas Perikanan Per 31 Desember 2025 sebesar Rp15.328.020.640,00 mengalami kenaikan sebesar Rp4.768.215.102,00 atau 45,15% dari tahun 2025 sebesar Rp10.559.805.538,00, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 12 Beban Pegawai Badan/Dinas Per 31 Desember 2025

No	Beban Pegawai - LO	Saldo LO TA 2025 (Rp)	Saldo LO TA 2025 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi - LO	2.652.144.960,00	2.680.798.440,00	162.044.450,00	6,43
2	Beban Gaji Pokok PPPK/ Uang Representasi - LO	1.890.908.637,00	538.619.400,00	538.619.400,00	100,00
3	Beban Tunjangan Keluarga PNS-LO	244.779.348,00	240.759.628,00	9.916.100,00	4,30
4	Beban Tunjangan Keluarga PPPK-LO	166.984.548,00	56.348.770,00	56.348.770,00	100,00
5	Beban Tunjangan Jabatan PNS – LO	132.440.000,00	146.705.000,00	(56.165.000,00)	(27,69)
6	Beban Tunjangan Fungsional - LO	77.000.000,00	125.840.000,00	118.940.000,00	1.723,77
7	Beban Tunjangan Fungsional PPPK-LO	56.140.000,00	61.470.000,00	61.470.000,00	100,00
8	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS – LO	70.385.000,00	69.650.000,00	(93.104.636,00)	(57,21)
	Beban Tunjangan Fungsional Umum PPPK – LO	93.416.648,00	0,00	(93.104.636,00)	(57,21)
9	Beban Tunjangan Beras – LO	136.728.960,00	142.522.560,00	(7.242.000,00)	(4,84)

No	Beban Pegawai - LO	Saldo LO TA 2025 (Rp)	Saldo LO TA 2025 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
10	Beban Tunjangan Beras PPPK- LO	128.008.385,00	40.917.300,00	40.917.300,00	100,00
11	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - LO	3.085.503,00	4.816.238,00	2.816.238,00	140,81
12	Beban Pembulatan Gaji PNS- LO	30.441,00	30.930,00	(5.206,00)	(14,41)
13	Beban Pembulatan Gaji PPPK- LO	41.781,00	10.588,00	10.588,00	100,00
14	Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS- LO	9.695.926.429,00	6.098.076.684,00	732.133.835,00	15,32
15	Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PPPK- LO	5.578.697.559,00	5.510.076.684,00	504.000.000,00	600,00
16	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	0,00	353.240.000,00	(243.270.600,00)	(40,78)
17	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	0,00	0,00	(0,00)	(100,00)
Jumlah		42.624.894.990,00	36.893.495.651,00	5.731.399.339,00	15,53

b. Beban Barang dan Jasa

Secara keseluruhan Beban Barang dan Jasa-LO Dinas/Badan Per 31 Desember 2025 sebesar Rp 33.895.755.081,00 mengalami Kenaikan sebesar Rp3.691.175.979,00 atau 12,22 dari tahun 2025 sebesar Rp30.204.579.102,00 yang secara rinci dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3. 13 Beban Barang dan Jasa Badan/Dinas Per 31 Desember 2025

No	Beban Barang dan Jasa - LO	TA 2025 (Rp)				Saldo LO TA 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
		Saldo LRA	Mutasi (+)	Mutasi (-)	Saldo LO			
1	Beban Bahan Pakai Habis - LO	18.871.964.057,00	230.952.573,00	17.040.090.306,00	(13.400.887.617,00)	5.692.103.587,00	(19.092.991.204,00)	(335,43)
2	Beban Persediaan Bahan/ Material - LO	2.174.563.545,00	6.399.556.680,00	2.465.220.594,00	6.108.899.631,00	3.890.686.925,00	2.218.212.706,00	57,01
3	Beban Jasa Kantor - LO	6.080.902.274,00	7.942.899.554,00	1.962.185.629,00	12.061.616.199,00	9.576.255.740,00	2.485.360.459,00	25,95
4	Beban Perawatan Kendaraan Bermotor - LO	1.877.711.145,00	168.850.000,00	0,00	2.046.561.145,00	1.638.636.709,00	407.924.436,00	24,89
5	Beban Cetak dan Penggandaan - LO	1.479.619.014,00	97.145.455,00	0,00	1.576.764.469,00	1.235.296.290,00	341.468.179,00	27,64
6	Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir - LO	885.875.000,00	0,00	0,00	885.875.000,00	698.440.000,00	187.435.000,00	26,84
7	Beban Sewa Sarana Mobilitas - LO	391.275.000,00	194.700.000,00	0,00	585.975.000,00	153.960.000,00	432.015.000,00	280,60
8	Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor - LO	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	52.000.000,00	(37.000.000,00)	(71,15)

No	Beban Barang dan Jasa – LO	TA 2025 (Rp)				Saldo LO TA 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
		Saldo LRA	Mutasi (+)	Mutasi (-)	Saldo LO			
9	Beban Makanan dan Minuman - LO	1.973.473.000,00	0,00	0,00	1.973.473.000,00	2.225.036.500,00	(251.563.500,00)	(11,31)
10	Beban Pakaian Dinas dan Atributnya - LO	68.400.000,00	0,00	0,00	68.400.000,00	191.115.000,00	(122.715.000,00)	(64,21)
11	Beban Pakaian Kerja - LO	158.900.000,00	0,00	0,00	158.900.000,00	271.136.000,00	(112.236.000,00)	(41,39)
12	Beban Pakaian khusus dan hari-hari tertentu - LO	134.715.000,00	0,00	0,00	134.715.000,00	279.824.000,00	(145.109.000,00)	(51,86)
13	Beban Perjalanan Dinas - LO	13.382.864.246,00	0,00	0,00	13.382.864.246,00	13.159.287.324,00	223.576.922,00	0,00
14	Beban Pemeliharaan - LO	792.216.450,00	0,00	0,00	792.216.450,00	591.440.469,00	200.775.981,00	33,95
15	Beban Jasa Konsultasi - LO	226.395.000,00	0,00	0,00	226.395.000,00	0,00	226.395.000,00	100,00
16	Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga - LO	494.325.000,00	0,00	494.325.000,00	0,00	403.777.000,00	(403.777.000,00)	(100,00)
17	Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS - LO	160.349.400,00	0,00	0,00	160.349.400,00	340.300.000,00	(179.950.600,00)	(52,88)
18	Beban Honorarium PNS - LO	1.909.326.872,00	0,00	0,00	1.909.326.872,00	3.136.775.413,00	(1.227.448.541,00)	(39,13)
19	Beban Honorarium Non PNS - LO	2.801.309.000,00	51.000.000,00	0,00	2.852.309.000,00	2.145.054.000,00	707.255.000,00	32,97
20	Beban yang bersumber dari Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional - LO	10.911.103.086,76	0,00	0,00	10.911.103.086,76	10.310.206.905,20	600.896.181,56	5,83
21	Beban Barang yang Tidak Habis Pakai di Bawah Nilai Kapitalisasi - LO	47.170.000,00	0,00	0,00	47.170.000,00	313.698.625,00	(266.528.625,00)	(84,96)
22	Beban Biaya Bahan - LO	2.465.220.594,00	0,00	0,00	2.465.220.594,00	524.042.027,00	1.941.178.567,00	370,42
23	Beban Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur-LO	1.170.438.500,00	0,00	0,00	1.170.438.500,00	810.200.500,00	360.238.000,00	44,46
24	Beban Operasional BLUD -LO	3.478.598.553,00	0,00	0,00	3.478.598.553,00	0,00	3.478.598.553,00	100,00
Jumlah		56.488.000.795,76	15.085.104.262,00	41.402.896.533,76	49.611.283.528,76	57.639.273.014,20	(8.027.989.485,44)	(13,93)

c. Beban Hibah

Secara keseluruhan Beban Hibah-LO Dinas/Badan Per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00 mengalami Penurunan sebesar (Rp1.439.927.750,00) atau 100% dari tahun 2025 sebesar Rp1.439.927.750,00. Adapun Beban Hibah-LO dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3. 14 Beban Hibah Badan/Dinas Per 31 Desember 2025

No	Beban Hibah – LO	TA 2025 (Rp)				Saldo LO TA 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
		Saldo LRA	Mutasi (+)	Mutasi (-)	Saldo LO			
1	Beban Hibah kepada Pemerintah - LO	0,00	254.520.000,00	0,00	254.520.000,00	348.340.000,00	(93.820.000,00)	(26,93)
2	Beban Hibah kepada Kelompok Masyarakat - LO	0,00	494.325.000,00	0,00	494.325.000,00	0,00	494.325.000,00	0,00
Jumlah		0,00	748.845.000,00	0,00	748.845.000,00	348.340.000,00	400.505.000,00	114,98

d. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Saldo Beban Penyusutan dan Amortisasi-LO Dinas/Badan Per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00 dengan selisih sebesar (Rp1.758.839.800,65) dari tahun 2025 yang sebesar Rp1.758.839.800,65 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3. 15 Beban Penyusutan dan Amortisasi Dinas/Badan Per 31 Desember 2025

No	Beban Penyusutan dan Amortisasi	TA 2025	TA 2025	Selisih
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	0,00	816.035.865,26	(816.035.865,26)
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	0,00	333.549.839,06	(333.549.839,06)
3	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	460.982.283,56	(460.982.283,56)
Jumlah		0,00	1.758.839.800,65	(1.758.839.800,65)

3.4 Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari laporan ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Ekuitas Awal

Jumlah ekuitas awal tahun anggaran 2025 sebesar Rp 49.090.981.195,30 merupakan saldo akhir ekuitas tahun 2025.

b. Penambahan Ekuitas dari Laporan Operasional (LO)

Penambahan/pengurangan ekuitas bersumber dari Saldo Surplus/Defisit-LO sebesar minus Rp 49.223.775.721,00 merupakan defisit atas kegiatan operasional (basis akrual) yang mengurangi nilai ekuitas pada Neraca Dinas/Badan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025.

c. Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan

Saldo kewajiban untuk dikonsolidasikan per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 52.568.585.876,00

d. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Perhitungan koreksi nilai persediaan tahun 2025 sebesar Rp0,00. Selisih revaluasi asset tetap sebesar Rp0,00. Koreksi ekuitas lainnya sebesar Rp0,00. Koreksi Ekuitas-Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebesar Rp 4.536,38. Koreksi Ekuitas-Akumulasi Penyusutan Aset tetap karena mutasi dan inventarisasi Rp0,00. Koreksi Ekuitas-Dana Transfer Rp0,00. Koreksi Ekuitas atas Klasifikasi Aset Tetap Tahun Sebelumnya Rp0,00.

e. Ekuitas Akhir

Jumlah Ekuitas Akhir tahun 2025 Rp 49.679.443.241,85 merupakan saldo Ekuitas Awal tahun 2025. Nilai pada ekuitas akhir per 31 Desember 2025 sebesar Rp 49.090.981.195,30 merupakan penjumlahan dari ekuitas awal ditambah surplus/defisit-LO ditambah dengan kewajiban untuk dikonsolidasikan dan dampak kumulatif kebijakan kesalahan mendasar.

BAB IV

PENJELASAN ATAS INFORMASI – INFORMASI NON KEUANGAN

4.1 Gambaran Umum

Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Timur sebagai perangkat daerah yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Timur menjalankan entitas akuntansi berdasarkan Undang-undang dan Peraturan Daerah dibawah ini :

1. Undang-undang nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1987 tentang Penetapan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda, Kotamadya Tingkat II Balikpapan, Kabupaten Dati II Kutai dan Kabupaten Dati II Kutai Timur (Lembaran Negara Nomor 45 Tahun 1987);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1996 tentang pembentukan 13 (tiga belas) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Dati II Kutai, Berau, Bulungan, Kutai Timur, Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda dan Balikpapan dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur (Lembaran Negara Nomor 56 Tahun 1996);

4.2 Struktur Organisasi

Secara normatif Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Timur, telah memiliki struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi yang jelas dan tegas, serta ditempatkan sebagai salah satu perangkat daerah dalam Organisasi Pemerintah Daerah (OPD), sejak ditetapkan dan diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 26 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Timur. Maka susunan Organisasi dan tata kerja Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Timur terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris;
3. Bidang Perikanan Budidaya;
4. Bidang Perikanan Tangkap;
5. Bidang Pegolahan, Pemasaran dan Pengawasan Perikanan;
6. Unit Pelaksana Teknis (UPT)
 - a. UPT BBI Kaliorang

- b. UPT BBIAL Teluk Kaba
- c. UPT BBU Teluk Lombok
- d. UPT TPI Kenyamukan
- e. UPT TPI Sangkulirang

Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Timur yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bidang Perikanan Budidaya, Dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Perikanan Tangkap, Dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Pengolahan, Pemasaran dan Pengawasan Perikanan, Dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Unit Pelaksana Teknis, Dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

4.3 Visi dan Misi

1. Visi

Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Timur sebagai SKPD yang mempunyai tugas mempersiapkan bahan dan perumusan kebijakan agar tugas – tugas tersebut mencapai hasil yang sebaik – baiknya. Dalam kaitan ini, Visi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Timur mengacu pada Visi Bupati Kutai Timur yaitu *“Menata Kutai Timur Sejahtera Untuk Semua”*.

2. Misi

Misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan Masyarakat yang berakhlak mulia, berbudidaya dan bersatu;
2. Mewujudkan daya saing ekonomi masyarakat berbasis sektor pertanian;
3. Mewujudkan pelayanan dasar bagi masyarakat secara proposional dan merata;
4. Mewujudkan pemerintahan yang partisipatif berbasis penegakan hukum dan teknologi informasi;
5. Mewujudkan sinergitas pengembangan wilayah dan integasi pembangunan yang berwawasan lingkungan.



BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari laporan keuangan yang telah disajikan pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Realisasi tahun anggaran 2025 sebesar Rp 52.569.092.876,00 atau 82.10% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp 64.027.788.081,00. Hal ini berarti, terjadi kenaikan sebesar Rp 5.795.075.354,00 atau 42,68% jika dibanding dengan tahun 2024 yang sebesar Rp 46.774.017.522,00.
2. Realisasi belanja pegawai tahun anggaran 2025 sebesar Rp15.328.020.640,00 atau 82.13% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp18.662.677,00. Hal ini berarti, terjadi kenaikan belanja pegawai sebesar Rp4.768.215.102,00 atau 32.09% jika dibanding dengan belanja tahun 2024 yang sebesar Rp10.559.805.538,
3. Realisasi belanja barang dan jasa tahun anggaran 2025 sebesar Rp 34.315.409.085,00 atau 81,38% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp 42.166.499.371,00. Hal ini berarti, terjadi Kenaikan belanja barang dan jasa sebesar Rp 3.794.047.383,00 atau 12.05% jika dibanding dengan belanja tahun 2024 yang sebesar Rp 30.521.361.702,00.
4. Realisasi belanja barang dan jasa tahun anggaran 2025 sebesar Rp 34.315.409.085,00 atau 81,38% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp 42.166.499.371,00. Hal ini berarti, terjadi Kenaikan belanja barang dan jasa sebesar Rp 3.794.047.383,00 atau 12.05% jika dibanding dengan belanja tahun 2024 yang sebesar Rp 30.521.361.702,00.

Secara umum, pencapaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Timur Per 1 Januari S/d31 Desember Tahun 2024 telah dapat memenuhi tugas pokok dan fungsi yang tercermin dari tercapainya seluruh indikator kinerja $\pm$ 82.10% pada selama Per 1 Januari S/d 31 Desember.

Pada pelaksanaan tahun 2025 tidak terserapnya anggaran disebabkan lambannya pengesahan DPA, lambannya SK Hibah terbit, keterbatasan SDM dan waktu pelaksanaan kegiatan, serta selisih atau sisa dari belanja barang yang tidak sesuai standar harga dan sisa dari kegiatan perjalanan dinas.

Kami menyadari bahwa penyajian Laporan Keuangan Akhir ini sangat sederhana mengingat keterbatasan yang kami miliki dan memerlukan koreksi lebih lanjut. Besar rasa terima kasih kami sampaikan kepada segenap jajaran di lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Timur yang telah mendukung tersusunnya Laporan Keuangan ini.



5.2 Saran

Adapun saran atas Laporan Keuangan Badan/Dinas yaitu beberapa hal sebagai berikut:

1. Penguatan atau percepatan progres pelaksanaan kegiatan dalam hal evaluasi pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran.
2. Evaluasi dan koordinasi perencanaan anggaran dan keuangan secara rutin, kendala dan permasalahan di PPTK dalam proses percepatan penyerapan anggaran masing-masing PPTK.
3. Pemantauan real-time terhadap progres anggaran untuk mengidentifikasi hambatan lebih dini.
4. Pastikan komunikasi intensif dengan pihak yang berkaitan seperti Bapeda, DPRD, dan instansi lain untuk percepatan persetujuan anggaran.
5. Hindari penumpukan realisasi anggaran di akhir tahun, karena dapat menyebabkan masalah seperti keterlambatan RKA dan DPA Perubahan, pembayaran dan wanprestasi.